



LAPORAN KEGIATAN TRIDHARMA

Nama Dosen : Suhendri, M.I.P NIDN : 1009108802 Jabatan Fungsional : Lektor 200

Fakultas/Prodi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Pemerintahan

Periode Pelaporan: 2024/2025

Tanggal Pelaporan: 21 September 2024

I. PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia mulai diterapkan secara lebih luas setelah reformasi 1998 sebagai respons terhadap sentralisasi kekuasaan selama Orde Baru. Dengan diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 23 Tahun 2014, otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan. Tujuannya adalah mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, dan memperkuat demokrasi lokal.

Namun, setelah lebih dari dua dekade, implementasi otonomi daerah menunjukkan berbagai tantangan, antara lain:

1. Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

Banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi karena lemahnya pengawasan, terutama dalam pengelolaan anggaran daerah dan pemberian izin usaha.

2. Ketimpangan Pembangunan

Otonomi daerah belum sepenuhnya mengurangi ketimpangan antarwilayah, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan atau antara Jawa dan luar Jawa.

3. Konflik Kepentingan Lokal dan Nasional

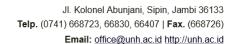
Beberapa kebijakan daerah sering kali bertentangan dengan kepentingan nasional, misalnya dalam pengelolaan sumber daya alam.

4. Minimnya Partisipasi Masyarakat

Proses pengambilan keputusan di tingkat lokal sering kali didominasi oleh elit politik dan tidak melibatkan masyarakat secara inklusif.

5. Kurangnya Inovasi dalam Pelayanan Publik

Banyak pemerintah daerah masih mengandalkan cara-cara konvensional dalam pelayanan, yang cenderung lambat dan tidak efisien.





Tujuan Seminar

- 1. **Mengidentifikasi Permasalahan dalam Implementasi Otonomi Daerah** Seminar ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang muncul selama pelaksanaan otonomi daerah, baik dari aspek regulasi, tata kelola pemerintahan, maupun dampaknya terhadap masyarakat.
- 2. **Merumuskan Gagasan untuk Rekonstruksi Pemaknaan Otonomi Daerah** Diskusi dalam seminar akan mengarah pada pembentukan pemahaman baru tentang otonomi daerah yang lebih relevan dengan tantangan dan kebutuhan saat ini, seperti penguatan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.
- 3. **Menjembatani Kepentingan Lokal dan Nasional**Seminar ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk menyelaraskan kebijakan lokal dengan agenda nasional tanpa mengorbankan kemandirian daerah.
- 4. **Mendorong Inovasi dalam Tata Kelola Daerah**Seminar ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peluang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi, terutama melalui penerapan teknologi digital dalam pelayanan publik.
- 5. Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
 Seminar akan mengedukasi masyarakat dan stakeholder lainnya tentang pentingnya peran
 aktif mereka dalam mendukung implementasi otonomi daerah yang inklusif dan
 demokratis.

Dengan membahas rekonstruksi pemaknaan otonomi daerah, seminar ini menjadi wadah untuk menemukan solusi kolektif dalam memperkuat tata kelola daerah yang lebih responsif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

II. KEGIATAN TRIDHARMA (Penunjang)

1. Jenis Kegiatan : Seminar Nasional

2. Lokasi Kegiatan : Semu Kampus Mendalo Fakultas Hukum Unja

3. Waktu Pelaksanaan: Kamis, 21-11-2024

4. Peserta : Undangan Dosen dan mahasiswa

5. Hasil yang dicapai : Hasil seminar akan dirumuskan sebagai rekomendasi konkret untuk pembuat kebijakan di tingkat nasional dan daerah, khususnya dalam penyempurnaan regulasi terkait otonomi daerah.

6. Penghargaan atau Sertifikasi yang Diterima

III. PENUTUP

Seminar ini menyoroti pentingnya rekonstruksi pemaknaan otonomi daerah di Indonesia sebagai respons terhadap berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Otonomi daerah, yang awalnya dimaksudkan untuk memperkuat demokrasi lokal dan mempercepat pembangunan, sering kali



menghadapi kendala seperti penyalahgunaan wewenang, lemahnya akuntabilitas, dan minimnya partisipasi masyarakat.

IV. LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS HUKUM

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM 15 Mendido Indah, Kode Pes 36361
Telp. 082179884083, 082185048578/cenait bakans@mja ac.id/lamma: law.unja.ac.id

18 November 2024

: 5963/UN21.4/DL.17/2024 : 1 (Satu) Berkas : Undangan Seminar Nasional

(Daftar Terlampir)

Dengan hormut, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Seminar Nasional bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi Tahun 2024 dengan judul "Rekonstruksi Pemaknaan Otonomi Daerah Di Indonesia". Sebubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat menugaskan 2 (dua) orang Dosen sebagai peserta dalam kegiatan tersebut yang diselenggarakan:

pada hari, tanggal : Kamis, 21 November 2024 waktu : Pukul 08.30 s.d. selesni tempat : Ruang Theater 2 Lantai 3 Gedung Peradilan Semu Kampus Mendalo

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Dr. Usman, S.H., M.H. NIP 196403031990031004



Balai

Sertifikasi

Elektronik

Liu ITE No III sahan 2008 pasal 5 Ayat 1 "Aykorono" Elektronik daniman Bahanen Elektronik hard orodnya
merapakan olar halat yang sah*

Dekamen ind distantariangan sacara elektronik mengganakan Sertifikat Elektronik yang ditarbitkan oleh Balai
Sertifikasi Elektronik (BSrtf), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN

- 1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin
- 2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- 3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Adiwangsa Jambi
- 4. Rektor Universitas Nurdin Hamzah Jambi 5. Rektor Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi
- 6. Rektor Institut Islam Muaro Jambi

Maju, Inovatif dan Berkarakter

Jl. Kolonel Abunjani, Sipin, Jambi 36133 Telp. (0741) 668723, 66830, 66407 | Fax. (668726)

Email: office@unh.ac.id http://unh.ac.id

YAYASAN DEWI NURDIN HAMZAH UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Maju, Inovatif dan Berkarakter Jl. Kolonel Abunjani, Sipin, Jambi 36133 Telp. (0741) 668723, 66830, 66407 | Fax. (668726) Email:office@unh.ac.idhttp://unh.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 267/UNH.02.1/DL/2024

Dekan Fisipol Universitas Nurdin Hamzah (UNH), memberikan tugas:

I. Kepada:

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Burlian Senjaya, S.Hi, MA	85.11.1.0040	Dosen Tetap IP
2	Suhendri, S.Sos, M.IP	88.19.1.0064	Kaprodi IP

- II. Tugas Untuk Menghadiri Undangan Seminar Nasional.
- III. Dilaksanakan tanggal 21-11-2024 s/d 21-11-2024 di Ruang Theater 2 Lantai 3 Gedung Peradilan Semu Kampus Mendalo Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- IV. Kepada pihak yang terkait dalam pelaksanaan tugas ini diharapkan bantuannya.
- V. Selesai melaksanakan tugas tersebut agar melaporkan hasilnya kepada Rektor Universitas Nurdin Hamzah.
- VI. Laporan kegiatan harap di unggah pada web kerjasama pada data kegiatan dosen pada domain kerma.unh.ac.id

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jambi, 21-11-2024 Dekan Fisipol,



Suryawahyuni latief, S.IP.,M.Pd.I., Ph.D

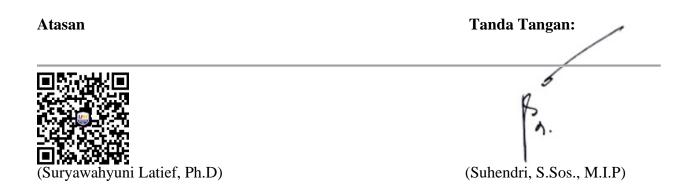
NIP: 19.0014

Tembusan:

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor I,II,dan III
- 3. Ka.Prodi Ilmu Pemerintahan
- 4. Arsip







Catatan:

Laporan wajib dikumpulkan paling lambat 1 minggu setelah kegiatan.